

Krisis Moderasi Beragama di Ruang Digital: Algoritma Sebagai Aktor Polarisasi Politik di Media Sosial

*The Crisis of Religious Moderation in the Digital Space: Algorithms as Actors in Political
Polarization on Social Media*

St. Shofiyah¹, Nur Hasanah Mahnan², Doni Ekasaputra³

¹Universitas Ibrahimy Situbondo, ²Institut K.H. Yazid Karimullah Sukowono Jember, ³Mahad Aly Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo

ARTICLE INFO

Article history:

Received 17 September 2026
Revised 25 September 2026
Accepted 28 September 2026
Available online 03 October 2026

Keywords

social media algorithms, political
polarization, religious moderation,
wasatiyyah, digital space.

Kata Kunci:

algoritma media sosial, polarisasi
politik, moderasi beragama,
wasatiyyah, ruang digital.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by
Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Political polarization on social media poses a serious challenge to the actualization of religious moderation (wasatiyyah) in the digital space. This article aims to analyze the role of social media algorithms in shaping political polarization and their impact on the values of religious moderation. This study employs a qualitative approach using library research. Data were collected through a review of scientific literature and various phenomena related to digital politics in Indonesia, and were subsequently analyzed using a descriptive-analytical method. The findings indicate that algorithms do not merely function as neutral instruments for information distribution but also play an active role in producing, intensifying, and reproducing polarization through four mechanisms: epistemic downranking, emotional amplification, fragmentation of meaning, and echo chamber reproduction. These four mechanisms restrict access to comprehensive information, intensify emotional responses, and limit users' exposure to differing perspectives. This condition undermines society's ability to uphold fairness, balance, and tolerance. This article proposes three pillars for strengthening religious moderation in the digital space: improving social media algorithm design, enhancing users' digital wasatiyyah competencies, and strengthening the roles of religious scholars

(ulama), academics, Islamic boarding schools (pesantren), and religious institutions as epistemic mediators. These three pillars must be implemented in an integrated manner to restore the quality of public knowledge and strengthen religious moderation in the digital era.

ABSTRAK

Polarisasi politik di media sosial menjadi tantangan serius bagi aktualisasi moderasi beragama (wasatiyyah) di ruang digital. Artikel ini bertujuan menganalisis peran algoritma media sosial dalam membentuk polarisasi politik serta dampaknya terhadap nilai-nilai moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui penelaahan literatur ilmiah dan berbagai fenomena politik digital di Indonesia, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa algoritma tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen distribusi informasi yang netral, tetapi turut berperan aktif dalam memproduksi, memperkuat, dan mereproduksi polarisasi melalui empat mekanisme, yaitu epistemic downranking, emotional amplification, fragmentation of meaning, dan echo chamber reproduction. Keempat mekanisme tersebut mempersempit akses terhadap informasi yang utuh, memperkuat respons emosional, dan membatasi keterpaparan pengguna terhadap perspektif yang berbeda. Kondisi ini melemahkan kemampuan masyarakat untuk bersikap adil, seimbang, dan toleran. Artikel ini menawarkan tiga pilar penguatan moderasi di ruang digital, yaitu perbaikan desain algoritma media sosial, penguatan kompetensi wasatiyyah digital pengguna, serta penguatan peran ulama, akademisi, pesantren, dan institusi keagamaan sebagai mediator epistemik. Ketiganya perlu dijalankan secara terpadu untuk memulihkan kualitas pengetahuan publik dan memperkuat moderasi beragama di era digital.

PENDAHULUAN

Polarisasi politik adalah situasi dimana masyarakat terpecah belah ke dalam kelompok politik tertentu. Satu sama lainnya berkelompok menurut pandangan, sikap, dan identitas

*Corresponding Author

Email: st.shofiyah90@gmail.com, nur.hasanah.mahnan@stisnq.ac.id, dony1saputra@gmail.com

sosialnya.¹ Sayangnya, keterhubungan mereka dengan masing-masing kelompoknya berkembang secara berlebihan dan melampaui batas-batas yang lazim dalam praktik demokrasi yang sehat. Mereka hanya mau menerima kelompok yang sejalan dengannya, sekaligus sangat sulit menerima kelompok lain yang berbeda. Perbedaannya tidak hanya menyangkut perbedaan pandangan politik, namun melibatkan dimensi emosional.

Dampaknya, ruang publik kehilangan kemampuan untuk berdialog secara sehat dan terbuka. Akhirnya, tingkat kepercayaan sosial menurun drastis, jarak antarkelompok melebar jauh, konflik horizontal terus terjadi dan berkepanjangan. Dalam banyak kasus, polarisasi membuat masyarakat tidak lagi bisa menilai seseorang berdasarkan argumentasi yang disampaikan, tetapi berdasarkan identitas politik yang melekat padanya.² Kondisi ini membuat rasionalitas publik semakin melemah karena penilaian terhadap sesuatu lebih didasarkan pada sentimen kelompok daripada pertimbangan objektif. Bahkan pada situasi tertentu, polarisasi bisa merusak kohesi sosial yang notabene-nya merupakan fondasi penting dalam menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih jauh lagi, polarisasi politik telah merusak nilai-nilai moderasi dalam masyarakat. Akibat polarisasi, seseorang menjadi kehilangan kemampuan untuk bersikap adil, *tawāzun* (keseimbangan), dan *tasāmuḥ* (toleransi) dalam menghadapi perbedaan. Akibat polarisasi, masyarakat semakin ekstrem dalam bersikap. Seseorang yang telah terjebak dalam identitas kelompok tertentu akan kehilangan ruangan untuk mendengar, memahami, dan menghargai pandangan yang berbeda. Dampaknya, perbedaan politik akan semakin meruncing sehingga nilai-nilai moderasi yang selama ini menjadi pilar kehidupan sosial menjadi rusak. Gara-gara polarisasi, politik yang semula adalah rahmat dan maslahat,³ berubah menjadi laknat dan mafsadat. Bila politik telah menjelma menjadi ruang laknat dan mafsadat maka tidak heran bila banyak masyarakat semakin jauh dari riuh rendah panggung politik.⁴

Polarisasi menemukan momentumnya ketika masyarakat mulai familiar dengan media sosial. Akibat media sosial, polarisasi politik menyebar dan berkembang semakin cepat dan luas. Situasi ini membuka fakta baru bahwa polarisasi terjadi bukan semata-mata masyarakat tidak memahami nilai moderasi. Bukan pula terpolarisasi semata-mata karena mereka memiliki pandangan politik yang berbeda dengan kelompok lainnya. Akan tetapi, cara kerja algoritma media sosial turut serta secara aktif membentuk polarisasi politik.

Demikian ini terjadi karena Algoritma dirancang untuk memaksimalkan perhatian dan keterlibatan pengguna (*engagement*) sehingga cenderung mempromosikan konten yang memicu emosi seperti kemarahan, ketakutan, dan kebencian. Disaat yang sama, pengguna media sosial juga lebih sering terpapar informasi yang sejalan dengan preferensinya sendiri, sementara informasi yang berbeda semakin jarang muncul dalam lini masa mereka. Situasi ini melahirkan fenomena filter bubble dan echo chamber yang memperkuat segregasi informasi dalam masyarakat.

Sebenarnya, polarisasi politik di media sosial sudah cukup banyak dibahas dalam berbagai artikel dan jurnal, namun perspektifnya masih menempatkan algoritma hanya sebagai instrumen yang netral. Itulah sebabnya, sebagian besar penelitian-penelitian yang ada fokusnya tertuju pada perilaku pengguna, penyebaran hoaks, atau kontestasi politik digital. Adapun peran algoritma sebagai aktor yang secara aktif membentuk distribusi informasi masih relatif tidak

¹ Shanto Iyengar et al., "The Origins and Consequences of Affective Polarization in the United States," *Annual Review of Political Science* 22, no. 1 (2019): 129–46, <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051117-073034>.

² Jennifer McCoy and Murat Somer, "Toward a Theory of Pernicious Polarization and How It Harms Democracies: Comparative Evidence and Possible Remedies," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 681, no. 1 (2019): 234–71, <https://doi.org/10.1177/0002716218818782>.

³ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Al-Turūq al-Hukmiyyah Fi al-Siyāsah al-Syar'iyyah* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995).

⁴ Doni Ekasaputra, *Ijtihad Politik K.H.R. Ach. Fawaid As'ad* (Ibrahimi Press, 2014). Hal. 12

dilihat sebagai suatu problem. Padahal, dalam ekosistem digital, algoritma tidak sekadar menjadi perantara yang netral, melainkan turut aktif menentukan informasi apa yang dilihat, disembunyikan, diperkuat, atau dilemahkan.

Keterbatasan perspektif itu mengakibatkan akar krisis moderasi di ruang digital tidak terselesaikan secara akurat. Bahasannya berhenti pada level perilaku individu dan belum menyentuh dimensi struktural yang bekerja di balik platform digital. Oleh sebab itu, artikel ini menawarkan perspektif yang berbeda. Artikel ini menempatkan algoritma sebagai aktor utama dalam proses polarisasi politik di media sosial. Hipotesisnya ialah krisis moderasi di ruang digital tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan ideologis, perbedaan politik dan tidak juga disebabkan oleh minimnya literasi nilai-nilai wasathiyah, namun dipengaruhi oleh cara kerja algoritma media sosial.

Kebaharuan artikel ini terletak pada upaya penulis dalam menjelaskan bagaimana algoritma menciptakan polarisasi politik yang berdampak pada rusaknya nilai-nilai *wasathiyah* di media sosial. Penjelasan fokus pada tata cara algoritma memproduksi, memperkuat, dan mereproduksi polarisasi. Dengan pendekatan ini, penulis berharap agar artikel ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memahami krisis moderasi di era digital. Dari itu kemudian terbuka ruang untuk merumuskan strategi menciptakan iklim moderasi yang tidak hanya berfokus pada pengguna, tetapi juga pada desain sistem digital yang melingkupinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam krisis moderasi beragama di ruang digital dengan menempatkan algoritma media sosial sebagai aktor yang turut membentuk polarisasi politik. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara mekanisme kerja algoritma dan melemahnya nilai-nilai wasathiyah dalam interaksi digital, khususnya melalui mekanisme epistemic downranking, emotional amplification, fragmentation of meaning, dan echo chamber reproduction.

Data penelitian bersumber dari literatur yang relevan, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi yang membahas algoritma media sosial, polarisasi politik, perilaku pengguna, dan moderasi beragama. Selain itu, penelitian ini menggunakan sejumlah fenomena politik digital di Indonesia sebagai bahan kajian kontekstual, antara lain Pilpres 2019, Pilkada DKI Jakarta 2017, Pemilu 2024, serta berbagai polemik dan gerakan politik yang berkembang di media sosial. Data tersebut dikaji untuk memahami keterkaitan antara distribusi informasi secara algoritmik, pembentukan persepsi publik, dan tantangan aktualisasi nilai-nilai moderasi beragama.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui penelaahan literatur, identifikasi pola, dan sintesis konseptual terhadap temuan-temuan yang relevan. Analisis difokuskan pada bagaimana algoritma memengaruhi visibilitas informasi, memperkuat respons emosional, memfragmentasi makna, dan membentuk ruang informasi yang homogen sehingga berpotensi memperbesar polarisasi politik. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan dalam perspektif moderasi beragama (wasathiyah) untuk merumuskan pemahaman konseptual mengenai krisis moderasi di ruang digital serta mengidentifikasi tiga pilar penguatannya, yaitu perbaikan desain algoritma media sosial, penguatan kompetensi wasathiyah digital pengguna, dan penguatan peran ulama, akademisi, serta institusi keagamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme kerja Algoritma Media Sosial

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa polarisasi politik di ruang digital terjadi bukan semata-mata karena masyarakat tidak tahu pada nilai-nilai moderasi. Polarisasi politik juga tidak selalu terjadi akibat perbedaan pandangan politik kelompok masyarakat. Aktornya tidak hanya manusia, tetapi juga ada intervensi cara kerja algoritma media sosial. Artinya, polarisasi politik yang menyebabkan hilangnya moderasi agama di media terjadi bukan karena faktor manusia saja, tetapi juga faktor algoritma.

Caranya, algoritma media sosial sering kali merusak cara masyarakat menerima dan memahami sebuah informasi. Dalam persoalan ini, penulis menjumpai empat mekanisme kerja media sosial di balik terciptanya polarisasi politik. Empat mekanisme yang dimaksud adalah *epistemic downranking*, *emotional amplification*, *fragmentation of meaning*, dan *echo chamber reproduction*. Secara teknis, empat mekanisme ini bekerja saling berkaitan dan saling menguatkan. Akibat empat mekanisme ini, praktik moderasi di media sosial menjadi sulit untuk aktualisasikan.

Mekanisme pertama ialah *epistemic downranking*. Maksudnya, algoritma sering kali menurunkan visibilitas konten yang panjang, kompleks, dan argumentatif.⁵ Disaat yang sama, algoritma media sosial justru lebih sering memprioritaskan konten yang sebaliknya. Hal ini berkaitan dengan karakteristik konten moderasi yang secara organik agak sulit mendapatkan *engagement*. Sebaliknya, algoritma cenderung memprioritaskan konten yang mendapatkan *engagement* tinggi. Dalam hal ini, konten-konten yang memancing luapan emosi cenderung mendapatkan *engagement* tinggi.⁶

Itulah sebabnya, konten yang ekstrem atau kontroversial jauh lebih mudah viral. Sebaliknya, konten-konten yang mengandung pesan moderasi sering kali terpinggirkan dari linimasa. Demikian ini karena konten moderasi acapkali kalah bersaing dengan narasi radikal yang lebih piawai memanipulasi sistem kerja algoritma. Situasi ini menegaskan bahwa ruang digital tidak selalu netral.

Ruang digital telah dikonstruksi oleh logika algoritmik yang berorientasi pada atensi sehingga dengan logika ini intensitas interaksi dijadikan sebagai ukuran utama visibilitas sebuah konten. Sisi negatifnya, nilai kebenaran dan kedalaman pesan sering kali tereduksi sehingga tercipta polarisasi.⁷ Dalam situasi ini, moderasi beragama tidak hanya berhadapan dengan ideologi ekstrem, tetapi juga dengan struktur algoritmik yang tidak berpihak.

Isu-isu dan fenomena politik di media sosial sangat dipengaruhi oleh hal-hal semacam itu. Sikap moderat biasanya membutuhkan penjelasan, sedangkan penjelasan membutuhkan waktu. Untuk memahami maksud sebuah pesan, kadang seseorang orang harus mendengar konten secara utuh dari awal sampai akhir. Masalahnya, media sosial seringkali tidak memberi ruang untuk itu. Justru Konten yang lewat di branda media sosial seseorang malah sebaliknya.

Jikapun di branda seseorang lewat konten yang betul-betul moderat, namun karena terlalu panjang dan tidak menarik akhirnya di-skip. Akibatnya, *engagement*-nya turun dan konten tersebut ditenggelamkan oleh algoritma. Belum lagi, banyak pengguna media sosial yang mencukupkan diri dengan hanya membaca judul di *thumbnail* sebuah konten. Sedangkan para konten kreator seringkali *lebay* dan berlebihan dalam membuat judul sebuah konten. Tidak hanya itu, banyak orang yang cenderung berhenti pada potongan-potongan kalimat dan cuplikan

⁵ Ferenc Huszár et al., "Algorithmic Amplification of Politics on Twitter," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 119, no. 1 (2022): e2025334119, <https://doi.org/10.1073/pnas.2025334119>.

⁶ Smitha Milli et al., "Engagement, User Satisfaction, and the Amplification of Divisive Content on Social Media," version 6, preprint, arXiv, 2023, <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2305.16941>.

⁷ Fabrizio Germano et al., *Ranking for Engagement: How Social Media Algorithms Fuel Misinformation and Polarization*, n.d. Hal. 10-15

singkat. Akibatnya, penjelasan yang betul-betul akurat menjadi sirna dan ditenggelam oleh algoritma.

Contohnya ialah polemik perubahan aturan pencalonan kepala daerah dan gelombang aksi tagar "#PeringatanDarurat" pada Agustus 2024. Saat itu, media sosial dipenuhi konten visual singkat, meme politik, dan potongan video emosional yang sangat cepat viral. Sebaliknya, penjelasan hukum tata negara yang panjang dan argumentatif dari akademisi, pakar hukum, maupun media arus utama relatif kurang mendapatkan perhatian publik. Akibatnya, ruang diskursus digital lebih didominasi oleh narasi hitam-putih, seperti "pro-demokrasi" versus "anti-demokrasi", daripada perdebatan konstitusional yang lebih kompleks.

Contoh lainnya seperti kasus demonstrasi 21–22 Mei 2019, pasca Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil resmi Pilpres 2019 yang menetapkan Joko Widodo menang atas Prabowo Subianto dengan sekitar 55,5% suara.⁸ Setelah pengumuman itu, ribuan massa berkumpul di sekitar kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta. Pada malam hari, aksi yang semula berlangsung sebagai bentuk protes politik berubah menjadi bentrokan di beberapa titik ibu kota. Akibat bentrokan ini, sedikitnya enam orang dilaporkan tewas dan ratusan terluka.⁹

Polarisasi digital tidak berhenti pada kontestasi elektoral antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto, tetapi bergeser menjadi pertarungan antara legitimasi prosedural negara dan legitimasi moral komunitas digital. Dalam ruang algoritmik, klaim kecurangan lebih mudah memperoleh visibilitas daripada klarifikasi institusional, sehingga polarisasi berkembang dari kompetisi politik menjadi delegitimasi terhadap hasil demokrasi itu sendiri.¹⁰

Kasus ini bukan sekadar demonstrasi. Tetapi, upaya untuk menyebarluaskan narasi delegitimasi hasil pemilu. Sebelum hasil resmi diumumkan, ruang digital sudah dipenuhi narasi seperti "pemilu dicurangi", "kemenangan direkayasa", dan "kedaulatan rakyat dirampas". Narasi-narasi itu sangat kuat dan tersebar luas karena bekerja secara algoritmik.¹¹

Di media sosial, konten yang menyebar luas bukan informasi rekapitulasi atau penjelasan prosedural dari Komisi Pemilihan Umum. Sebaliknya, yang lebih cepat naik dan tersebar luas ialah potongan video emosional, klaim viral tentang kecurangan, cuplikan pidato bernada mobilisasi, unggahan yang membingkai hasil pemilu sebagai ketidakadilan dan lain-lain. Di titik ini, yang dipertentangkan bukan lagi sekadar siapa menang dan siapa kalah. Narasi yang disebarluaskan ialah pertentangan antara "hasil resmi negara" versus "kebenaran versi komunitas politik tertentu." Beginilah proses terbentuknya polarisasi politik di tanah air.

Di sinilah algoritma mendistorsi nilai-nilai moderasi di media sosial. Padahal dalam kerangka moderasi (*wasatiyyah*), perbedaan politik masih berada dalam batas *ikhtilaf* yang sah. Kritik boleh disampaikan secara keras, namun tetap harus berjalan dalam batas-batas yang wajar. Kasus ini membuktikan bahwa algoritma tidak hanya mengamplifikasi oposisi politik, tetapi juga mengamplifikasi delegitimasi institusional.

Di kasus ini terlihat terlihat jelas bagaimana *epistemic downranking* bekerja. Tidak semua masyarakat menolak moderasi dan masyarakat tahu pentingnya kehati-hatian. Namun masalahnya, penjelasan yang utuh kalah cepat dibanding potongan yang memicu emosi. Akibatnya, orang tidak menilai berdasarkan keseluruhan persoalan. Orang menilai berdasarkan bagian yang paling kontroversial dan yang paling mudah mengundang marah. Dari sini nampak

⁸ Zunita Putri, "KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Pemenang Pilpres 2019," *detikNews*, May 21, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4558950/kpu-tetapkan-jokowi-maruf-pemenang-pilpres-2019>.

⁹ Maharani Kusuma Tsarina, "Anies: 8 Orang Meninggal Dunia dalam Aksi 21-22 Mei," *detikNews*, May 23, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4562836/anies-8-orang-meninggal-dunia-dalam-aksi-21-22-mei>.

¹⁰ Muhammad Arief Virgy et al., "Social Media Shutdown: A Political and Cyber Securitization of Indonesia's 2019 Presidential Election," *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 12, no. 2 (2020).

¹¹ Wildhan Khalyubi and Aditya Perdana, "Electoral Manipulation Informationally on Hoax Production in 2019 Presidential and Vice Presidential Election in Indonesia," *Journal of Government and Political Issues* 1, no. 2 (2021): 87–99, <https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i1.17>.

terlihat bahwa media sosial mempersempit ruang untuk bersikap moderat. Padahal, moderasi membutuhkan gambaran yang utuh. Namun media sosial justru sering menyodorkan gambaran yang paling singkat dan paling kontroversial.

Fenomena serupa juga tampak pada 2024 Indonesian *general election*. Pada waktu itu, banyak orang tidak menonton keseluruhan debat calon presiden. Banyak orang yang hanya melihat potongan-potongan video klip pendek yang beredar di media sosial. Dari satu potongan klip itu lalu muncul penilaian-penilaian yang jauh dari nilai-nilai moderasi.¹²

Padahal, debat yang sebenarnya ialah keseluruhan rangkaian acara debat. Untuk itu, penilaian yang akurat terhadap substansi sebuah debat dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Ketika yang beredar hanya potongan, pemahaman publik juga ikut terpotong. Di sini *epistemic downranking* tidak hanya menurunkan visibilitas penjelasan, tetapi menurunkan kesempatan masyarakat untuk menilai sebuah konten secara utuh.

Padahal, besar kemungkinan seseorang akan mampu bersikap adil kalau ia mendengar informasinya secara utuh. Orang masih bisa bersikap proporsional kalau ia tahu konteksnya. Tetapi media sosial sering membuat orang hanya melihat bagian yang paling panas. Maka yang terjadi bukan hilangnya ajaran moderasi. Namun yang terjadi ialah menyempitnya ruang untuk memahami sebuah informasi

Algoritma dan *Emotional Amplification*

Mekanisme kedua ialah *emotional amplification*, yaitu naiknya jangkauan konten yang provokatif dan afektif. Dengan mekanisme ini, algoritma media sosial cenderung lebih memprioritaskan konten yang memancing emosi, kemarahan dan ekspresi emosional lainnya.¹³ Dengan begitu, seseorang terdorong untuk menulis komentar atau minimal like. Dengan itu pula, orang membagikan ulang sebuah konten (*share*) dan emosi juga membuat seseorang bertahan lebih lama di layar.

Dalam struktur sistem algoritma media sosial, semua bentuk reaksi itu dibaca sebagai tanda bahwa konten tersebut menarik. Konten tersebut kemudian direkomendasikan oleh algoritma kepada orang lagi sehingga *viewers*-nya lebih banyak dan begitu seterusnya sehingga menjadi konten yang viral. Dalam situasi seperti ini, masyarakat sangat mudah terpapar konten yang membuat mereka tersinggung, marah, atau curiga.¹⁴ Tentunya, cara kerja algoritma seperti ini sangat berbahaya dalam setiap aktivitas kegiatan politik.

Contohnya ialah viralnya slogan “Indonesia Gelap”. Slogan ini tersebar cukup lama di sepanjang tahun 2025. Konten video demonstrasi, narasi ancaman terhadap demokrasi, serta unggahan yang menampilkan kemarahan kolektif terhadap pemerintah paling banyak memperoleh *engagement*. Sebaliknya, analisis kebijakan publik yang panjang mengenai substansi tuntutan demonstrasi memperoleh perhatian yang jauh lebih kecil. Dalam kasus ini, algoritma media sosial memperkuat emosi berupa ketakutan (*fear*), kemarahan (*anger*), dan kecemasan kolektif (*collective anxiety*), sehingga mempercepat penyebaran narasi polarisatif. Pola yang sama terjadi pada saat viralnya Tagar #KaburAjaDulu. Pada mulanya, tagar ini merupakan ekspresi frustrasi generasi muda terhadap kondisi ekonomi dan politik nasional, kemudian berkembang luas menjadi fenomena politik digital yang sangat viral. Narasi yang paling banyak disebarluaskan bukanlah analisis struktural tentang pasar kerja, pendidikan, atau migrasi,

¹² Kate Lamb, “K-Pop, TikTok and Cats: The Fight to Win the Key Youth Vote in Indonesia’s Election,” *The Guardian*, February 12, 2024, <https://www.theguardian.com/world/2024/feb/12/indonesia-election-2024-k-pop-tiktok-and-cats-the-fight-to-win-the-key-youth-vote>.

¹³ Hannah Metzler and David Garcia, “Social Drivers and Algorithmic Mechanisms on Digital Media,” *Perspectives on Psychological Science* 19, no. 5 (2024): 735–48, <https://doi.org/10.1177/17456916231185057>.

¹⁴ William J. Brady et al., “How Social Learning Amplifies Moral Outrage Expression in Online Social Networks,” *Science Advances* 7, no. 33 (2021): eabe5641, <https://doi.org/10.1126/sciadv.abe5641>.

melainkan ungkapan emosional seperti "Indonesia sudah tidak punya masa depan" atau "lebih baik pergi daripada bertahan".

Kasus yang paling jelas tampak pada pilgub Jakarta 2017. Pada waktu itu, banyak konten yang viral bukan karena paling informatif tetapi karena paling mampu membakar emosi masyarakat atas nama agama. Masyarakat terus menerus terpapar oleh konten-konten yang seperti itu.¹⁵ Pada akhirnya, ruang digital perlahan membelah masyarakat ke dalam dua kubu yang bersitegang, yaitu pembela agama di satu sisi dan penista agama di sisi yang lain.¹⁶

Dalam situasi seperti itu, informasi parsial yang provokatif bergerak lebih cepat daripada konten yang utuh. Masyarakat menerima konten berisikan potongan video, kutipan singkat, dan judul-judul provokatif tanpa mengetahui konteks yang sebenarnya.¹⁷ Saat konten membuat orang terusik, konten itu segera dibagikan ulang, dikomentari, dan terus menerus diperdebatkan. Akibatnya, yang paling cepat membentuk persepsi publik bukan klarifikasi, melainkan ledakan emosi hingga terjadilah aksi 212 yang diklaim dihadiri oleh puluhan jutaan umat muslim dari berbagai penjuru Indonesia.¹⁸

Di sinilah *emotional amplification* bekerja dengan sangat nyata. Konten yang memicu kemarahan lebih diperkuat oleh algoritma media sosial. Ketika kemarahan terus diperkuat, perbedaan politik tidak lagi dibaca sebagai perbedaan pilihan dalam berdemokrasi. Akan tetapi, perbedaan berubah menjadi pertikaian moral antara pihak yang merasa sedang membela agama dan pihak yang dianggap telah menistakan agama.

Dalam situasi seperti ini, kita melihat ada perubahan sikap politik yang berubah cukup signifikan. Hal ini karena orang merasa bahwa pertarungan politik bukan lagi mempertaruhkan gagasan politik, namun menyangkut martabat agama. Dampaknya, Lawan politik dianggap ancaman moral yang tidak bisa ditoleransi. Posisi lawan politik tidak hanya dianggap salah secara pilihan, namun sekaligus dianggap sangat membahayakan.

Begitu lawan politik dianggap ancaman dan membahayakan, ruang untuk bertindak moderasi menjadi hilang. Dalam kondisi seperti ini, orang tidak lagi tertarik mendengar konten-konten dengan penjelasan yang lebih lengkap. Orang lebih tertarik pada konten yang menguatkan rasa amarahnya. Bila amarah telah mendominasi dalam diri seseorang maka sulit baginya untuk berfikir lebih jernih.

Di titik ini, moderasi menjadi sulit dipraktikkan. Sulit dipraktikkan bukan karena orang tidak tahu bahwa marah berlebihan itu tidak baik. Akan tetapi karena arus informasi lebih awal membuatnya emosi, tersinggung dan marah. Biasanya, orang seperti itu sulit mau mendengar penjelasan dari orang lain. Bila seseorang sudah merasa sakit hati, marah, atau terhina, fokus pikirannya sering hanya tertuju pada bagian yang melukai dirinya. Akibatnya, ia menjadi sulit melihat hal-hal di luar itu secara komprehensif. Itulah sebabnya, media sosial bisa mempercepat terciptanya polarisasi. Untuk keperluan seperti itu, algoritma media sosial tidak perlu mengubah pengetahuan dan keyakinan orang, tetapi cukup memantik emosi orang.

Tiga Pilar Penguatan Moderasi di Media Sosial

Pertama, Perbaiki Algoritma Media Sosial

Jika akar persoalan polarisasi politik bermula dari cara kerja algoritma, maka yang pertama kali dilakukan ialah memperbaiki cara kerjanya. Algoritma yang selama ini hanya

¹⁵ Merlyna Lim, "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia," *Critical Asian Studies* 49, no. 3 (2017): 411–27, <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>.

¹⁶ Marcus Mietzner and Burhanuddin Muhtadi, "Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation," *Asian Studies Review* 42, no. 3 (2018): 479–97, <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>.

¹⁷ Iswandi Syahputra, "Social Media Activities and the 212 Movement: The Indonesian Ulema Council's Perspective," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 2 (2020): 323–54, <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.323-354>.

¹⁸ Nurul Shalihin and M. Yusuf, "Islamic Populism in The Public Sphere and Interest in 212 Action," *Indonesian Journal of Religion and Society* 4, no. 2 (2022): 131–39, <https://doi.org/10.36256/ijrs.v4i2.309>.

dirancang untuk memaksimalkan *engagement* saja, maka perlu didesain ulang agar bekerja berdasarkan nilai-nilai moderasi. Konsep ini berangkat dari gagasan bahwa moderasi tidak cukup diajarkan kepada manusia, tetapi juga harus ditanamkan pada desain sistem digital. Dengan demikian, moderasi (*wasatiyyah*) tidak hanya menjadi etika pengguna, tetapi juga menjadi prinsip kerja desain teknologi digital itu sendiri.

Selama ini, platform mendesain cara kerja algoritma semata-mata agar *engagement* meningkat pesat. Asumsinya, semakin banyak komentar, *like*, *share*, dan waktu tonton, tentu peluang sebuah konten untuk direkomendasikan semakin tinggi juga. Secara bisnis, logika seperti ini sangat menguntungkan karena pengguna bisa lebih lama bertahan di aplikasi. Dengan begitu, trafik semakin meningkat sehingga pendapatan iklan bertambah.

Akan tetapi, logika seperti itu sering kali berdampak negatif. Salah satunya, lahirnya polarisasi politik yang berujung pada terciptanya konflik dan perpecahan. Demi mengejar *engagement*, kreator terdorong untuk membuat judul yang provokatif dan sensasional. Mereka kemudian membuat konten digital yang lebih menonjolkan konflik daripada konten yang mendamaikan. Dalam situasi seperti ini, algoritma tidak lagi menjadi alat distribusi informasi yang netral. Algoritma telah berubah menjadi mekanisme yang secara tidak langsung memberi ruang kepada konten yang paling mampu memancing reaksi emosional.

Oleh sebab itu, perusahaan perlu mendesain ulang indikator keberhasilan algoritma media sosial. Keberhasilan jangan hanya semata-mata diukur melalui kuantitas interaksi. Jika ukuran keberhasilannya hanya berupa *engagement*, maka bisa dipastikan bahwa algoritma akan terus-menerus melahirkan polarisasi secara sistematis. Dengan demikian, perusahaan media sosial perlu merubah desain algoritmanya agar cara kerjanya menjadi lebih moderat. Misalnya, platform mengembangkan desain sistem integritas konteks (*context integrity system*).

Cara kerjanya, sistem melacak apakah konten yang viral seperti video merupakan potongan dari konten yang lebih panjang? Jika sistem menterdeteksi hanya berupa cuplikan singkat dan berpotensi menciptakan kesalahpahaman, algoritma secara otomatis menampilkan tautan menuju versi lengkapnya. Dengan demikian, pengguna tidak hanya melihat fragmen informasi, tetapi juga memperoleh konteks yang utuh. Sistem seperti ini dapat mengurangi *fragmentation of meaning* yang selama ini menjadi sumber kesalahpahaman publik.

Selain itu, platform dapat memperkuat kembali lapisan pemeriksaan fakta algoritma (*algorithmic fact-checking layer*). Penulis Menggunakan bahasa memperkuat kembali karena sistem ini sebenarnya sudah digunakan oleh sebagian orang. Ada aplikasi yang secara khusus digunakan untuk memeriksa fakta yang beredar di media sosial. Akan tetapi yang terjadi selama ini ialah seseorang melakukan *fact-checking* setelah sebuah informasi telanjur viral.¹⁹ Cara ini berjalan kurang efektif karena koreksi yang datang belakangan sering kalah cepat dibanding penyebaran informasi awal. Oleh karena itu, sistem verifikasi perlu ditempatkan lebih dekat dengan proses distribusi algoritmik. Ketika sebuah konten terdeteksi mengandung klaim yang kontroversial atau berpotensi menyesatkan, algoritma dapat menambahkan keterangan verifikasi, sumber pembandingan, atau penjelasan tambahan sebelum konten tersebut didistribusikan secara luas. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa cara sanga efektif menurunkan berita palsu dan sejenisnya.²⁰

Bila dikaitkan dengan ayat Alquran, sistem *algorithmic fact-checking layer* sejalan dengan firman Allah swt dalam surah al-Hujarat ayat 6. *"Jika datang kepada kalian seorang fasik*

¹⁹ Jiexun Li and Xiaohui Chang, "Combating Misinformation by Sharing the Truth: A Study on the Spread of Fact-Checks on Social Media," *Information Systems Frontiers* 25, no. 4 (2023): 1479–93, <https://doi.org/10.1007/s10796-022-10296-z>.

²⁰ Cameron Martel and David G. Rand, "Fact-Checker Warning Labels Are Effective Even for Those Who Distrust Fact-Checkers," *Nature Human Behaviour* 8, no. 10 (2024): 1957–67, <https://doi.org/10.1038/s41562-024-01973-x>.

membawa berita maka lakukanlah tabayyun." Spirit dari ayat ini bisa ditarik dalam konteks *algorithmic fact-checking layer* karena pada prinsipnya Allah swt memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan *tabayyun* terhadap berita atau informasi yang berpotensi salah. Kalau konteks dulu kekeliruan atau kebohongan bisa datang dari orang fasik, maka hari ini munculnya dari sistem algoritmik. Salah satu bentuk *tabayyun* yang dimaksud ialah dengan melakukan verifikasi dan memeriksa fakta yang sebenarnya terjadi sehingga validasi sebuah berita di media sosial bisa dipertanggung jawabkan.²¹

Berikutnya, platform juga perlu menerapkan sistem peringatan reflektif (*reflective warning system*). Melalui sistem ini, penulis tidak mengusulkan untuk melakukan menyensor konten, melainkan pengguna diajak untuk rehat sejenak sebelum membagikan sebuah informasi. Saat membaca sebuah artikel di media sosial, misalnya tiba-tiba muncul notifikasi: "Jika artikel ini belum Anda baca secara utuh, terlalu beresiko jika dibagikan?" atau "Konten ini sedang diperdebatkan oleh banyak orang dan memiliki beberapa versi informasi yang berbeda sehingga Anda perlu membaca versi lainnya sebagai pembanding." Sistem ini sudah mulai diterapkan di beberapa platform karena berdasarkan sebuah penelitian perilaku digital menunjukkan bahwa jeda beberapa detik saja sering cukup untuk menurunkan perilaku impulsif dalam berbagi informasi.²²

Selain itu, guna mengatasi problem *emotional amplification*, platform dapat mengembangkan sistem peringkat yang memperhatikan emosi (*emotion-aware ranking system*). Dengan menerapkan sistem ini, platform bisa lebih awal mendeteksi konten yang secara ekstrem memanfaatkan kemarahan, ketakutan, kebencian, atau provokasi sebagai alat utama untuk memperoleh *engagement*. Sistem ini sangat bisa dilakukan karena Algoritma dan AI dapat mendeteksi emosi pengguna maupun emosi konten.²³ Hemat penulis, konten seperti ini tidak harus dihapus secara total. Akan tetapi, algoritma cukup mengurangi penyebarannya sehingga tidak memperoleh ruang untuk viralitas secara berlebihan.

Disaat yang bersamaan, sistem ini memperluas penyebaran konten sebaliknya. Sistem memberikan ruang tambahan kepada konten yang mengandung argumentasi, penjelasan mendalam, dialog, dan diskusi yang konstruktif. Dengan demikian, konten yang mendorong pemahaman yang komprehensif tidak selalu kalah oleh konten parsial yang mendorong kemarahan. Ini merupakan bentuk perlawanan yang efektif terhadap mekanisme *epistemic downranking*.

Solusi berikutnya ialah sistem rekomendasi lintas perspektif (*cross-perspective recommendation system*). Cara ini dilakukan agar seseorang tidak terjebak ke dalam *filter bubble* atau untuk mengurangi *echo chamber reproduction*. Caranya, algoritma secara berkala merekomendasikan konten yang berbeda dari preferensi politik pengguna, namun tetap harus bersumber dari rujukan yang kredibel dan argumentatif. Dalam konteks politik dan agama, ketika seseorang mengakses konten yang membahas isu sensitif, algoritma tidak hanya menampilkan konten serupa, tetapi juga menyediakan akses ke penjelasan alternatif atau perspektif kelompok lain. Sebuah penelitian di Facebook menemukan bahwa kalau sekadar memberi tanda "hoaks" saja tidak terlalu efektif sehingga sebagian platform beralih pada model yang menampilkan artikel pembanding dan konteks tambahan di sekitar konten yang dipersoalkan.²⁴

²¹ Muhammad ibn Jarir al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Cetakan Pertama (Dār Hajr li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī' wa al-I'lān, 2001). Vol. XXI, Hal. 349

²² Gionnieve Lim and Simon T. Perrault, "Effects of Automated Misinformation Warning Labels on the Intents to Like, Comment and Share Posts," *arXiv*, March 19, 2024, <https://arxiv.org/abs/2403.12916>.

²³ Bingbing Wen et al., "Towards Generating Robust, Fair, and Emotion-Aware Explanations for Recommender Systems," version 1, preprint, arXiv, 2022, <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2208.08017>.

²⁴ Eli Meixler, "Facebook Is Dropping Its Fake News Red Flag Warning After Finding It Had the Opposite Effect," *TIME*, December 22, 2017, <https://time.com/5077002/facebook-fake-news-articles/>.

Sesungguhnya, konsep *cross-perspective recommendation system* s memiliki landasan normatif yang sangat relevan dengan Al-Qur'an surah al-zimar ayat 18. Dalam Hal ini, Allah Swt. berfirman: "Mereka yang mendengarkan berbagai perkataan lalu mengikuti yang terbaik di antaranya." (QS. Az-Zumar: 18). Salah satu tafsir menyebutkan bahwa ayat ini menjelaskan pentingnya menggunakan akal, penalaran, dan kemampuan berpikir kritis untuk menelaah berbagai pandangan sebelum menentukan pilihan yang dianggap paling benar. Demikian ini penting agar seseorang tidak terjebak pada fanatisme dan tidak pula menerima satu pendapat secara membabi buta. Orang-orang yang membuka diri terhadap berbagai informasi dan argumentasi kemudian Allah sebut sebagai *ulū al-albāb*.²⁵

Dalam konteks ruang digital, nilai inilah yang ingin diwujudkan melalui *cross-perspective recommendation system*. Sistem ini diterapkan tidak untuk mengubah pilihan politik seseorang. Dengan sistem ini, pengguna bisa terbantu untuk memahami bahwa suatu persoalan bisa memiliki banyak dimensi dan tidak selalu dapat direduksi menjadi narasi hitam-putih. Tujuannya adalah memperluas horizon informasi sehingga pengguna terbiasa melihat keberadaan perspektif lain dalam ruang publik. Dengan sistem ini, algoritma secara aktif ikut membentuk opini publik secara lebih reflektif, kritis, dan proporsional tanpa terjebak dalam polarisasi yang berlebihan.

Kedua: Penguatan Kompetensi *wasathiyah* digital

Jika pada level platform tanggung jawab berada pada perusahaan media sosial dan para perancang algoritma, maka pada level berikutnya tanggung jawab berada pada pengguna. Dalam konteks ini, pengguna media sosial tidak dapat diposisikan sebagai korban pasif yang sepenuhnya dikendalikan oleh algoritma. Algoritma memang memengaruhi perilaku pengguna, tetapi pengguna tetap memiliki kemampuan untuk memilih, menilai, menerima, menolak, atau membagikan informasi.

Oleh sebab itu, upaya membangun moderasi digital juga harus menyentuh aspek perilaku pengguna itu sendiri. Dalam artikel ini, kemampuan tersebut penulis sebut sebagai kompetensi *wasathiyah* digital (*digital wasatiyyah competence*). Hemat penulis, dengan kompetensi ini seseorang akan tetap mampu bersikap moderat saat berhadapan dengan arus informasi digital yang sangat cepat. Kompetensi ini bukan sekadar memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi dan mengoperasikan media sosial. Lebih dari itu, kompetensi *wasathiyah* digital ini berkaitan erat dengan kemampuan seseorang saat mengelola informasi, mengendalikan emosi, dan bisa secara profesional dan proporsional menilai sebuah informasi.

Kompetensi pertama ialah kemampuan mengendalikan diri agar tidak tergesa-gesa membagikan informasi. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa salah satu masalah terbesar dalam bermedia sosial ialah seseorang seringkali tergesa-gesa ingin segera membagikan sebuah informasi. Sering kali seseorang berambisi sebagai orang pertama yang membagikan dan memposting sebuah konten informasi. Untuk itu, Banyak orang membagikan sebuah informasi beberapa detik setelah melihatnya. Bahkan lebih parahnya lagi, banyak orang membagikan sebuah informasi tanpa pernah membuka tautannya terlebih dahulu. Penulis menjumpai keterangan dalam sebuah artikel bahwa di twitter ada sekitar 59% URL yang dibagikan di Twitter sama sekali tidak pernah diklik²⁶. Rujukan lainnya mengatakan bahwa dari 35 juta tautan berita yang beredar di Facebook, lebih dari 75% tautan tersebut dibagikan tanpa pernah diklik dan dibaca terlebih dahulu oleh pengguna yang membagikannya.²⁷ Akibatnya, informasi yang belum

²⁵ Muhammad Faruq Faris al-Zayn, *Bayān al-Naẓm fī al-Qur'ān al-Karīm*, Cetakan Pertama, vol. 4 (Dar al-Fikr, 2004). Vol.III, Hal. 487

²⁶ Maksym Gabielkov et al., "Social Clicks: What and Who Gets Read on Twitter?," *Proceedings of the 2016 ACM SIGMETRICS International Conference on Measurement and Modeling of Computer Science*, June 14, 2016, 179–92, <https://doi.org/10.1145/2896377.2901462>.

²⁷ Ashley WenersHerron, "Social Media Users Probably Won't Read Beyond This Headline, Researchers Say," *Penn State University News*, November 19, 2024, <https://www.psu.edu/news/research/story/social-media-users-probably-wont-read-beyond-headline-researchers-say>.

tentu benar dapat menyebar lebih luas dan lebih cepat. Dalam situasi seperti ini, sikap menunda sejenak sebelum membagikan informasi merupakan bentuk moderasi yang sangat penting.

Kompetensi kedua ialah kemampuan membaca sumber informasi secara utuh. Di media sosial, banyak orang mencukupkan diri hanya dengan membaca judul, melihat *thumbnail*, atau menyimak potongan video pendek. Setelah itu mereka langsung menarik kesimpulan sendiri bahkan merasa paling tahu dan paling pintar.²⁸ Padahal, isi sebuah konten tidak sepenuhnya sesuai berdasarkan judul yang tertulis di *thumbnail*.²⁹ Oleh Sebab itu, pengguna media sosial wajib membiasakan diri untuk membaca konten sampai tuntas, melihat sumber asli, mendengar penjelasan secara lengkap, dan memahami konteks sebelum memberikan penilaian. Dengan cara ini, seseorang bisa terhindar dari kesalahpahaman yang diakibatkan oleh informasi yang tidak utuh (terpotong-potong).

Kompetensi ketiga adalah kemampuan untuk membandingkan berbagai sumber informasi. Kemampuan ini mutlak dimiliki seseorang akibat melimpahnya informasi di media sosial. Dalam situasi seperti ini, pengguna media sosial tidak boleh mencukupkan diri hanya dengan mengandalkan satu sumber informasi saja. Sebuah informasi perlu dibandingkan dengan sumber lainnya.³⁰ Jika Sebuah laman berita mengklaim sebuah informasi maka seseorang perlu mengujinya dengan membandingkannya dengan data yang berbeda. Dengan cara seperti ini, seseorang bisa melihat suatu persoalan secara utuh karena informasi diperoleh dari berbagai sudut pandang.³¹ Semakin banyak perspektif yang dipertimbangkan maka seseorang bisa dengan mudah bersikap adil dan proporsional (moderat).

Kompetensi keempat adalah kemampuan mengendalikan emosi saat menggunakan media sosial. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak konflik di media sosial berawal dari ledakan emosi yang tidak terkendali.³² Di media sosial, orang bisa dengan mudah marah, tersinggung, atau merasa terancam.³³ Orangpun cenderung reaktif sehingga sering kali bereaksi lebih cepat tanpa berpikir lebih dahulu. Itulah penyebab utama kenapa media sosial sering dipenuhi komentar kasar, caci maki, dan pertengkaran yang tidak produktif. Oleh sebab itu, pengguna perlu melatih diri untuk tidak cepat bereaksi ketika menemukan konten yang memicu emosi. Dalam situasi seperti ini, kemampuan mengendalikan emosi merupakan bagian penting dari kompetensi *wasatiyyah* digital.

Kompetensi kelima ialah kesadaran algoritmik (*algorithmic awareness*). Selama ini, pengguna media sosial menganggap bahwa apa yang muncul di beranda merupakan gambaran utuh tentang kenyataan. Padahal, apa-apa yang muncul sebenarnya merupakan hasil seleksi algoritma.³⁴ Algoritma memilih konten tertentu dan mengabaikan konten lainnya. Algoritma menentukan apa yang sering dilihat dan apa yang jarang terlihat. Ketika pengguna memahami hal ini, mereka akan lebih kritis terhadap informasi yang diterimanya. Mereka tidak mudah menganggap bahwa apa yang muncul di layar merupakan satu-satunya realitas yang ada.

Pada akhirnya, *digital wasatiyyah competence* merupakan upaya untuk mengembalikan kemampuan berpikir moderat di tengah ruang digital yang sangat cepat, emosional, dan

²⁸ Ullrich K. H. Ecker et al., "The Effects of Subtle Misinformation in News Headlines," *Journal of Experimental Psychology: Applied* 20, no. 4 (2014): 323–35, <https://doi.org/10.1037/xap0000028>.

²⁹ Hyewon Choi et al., "How Does Fake News Use a Thumbnail? CLIP-Based Multimodal Detection on the Unrepresentative News Image," version 2, preprint, arXiv, 2022, <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2204.05533>.

³⁰ Sam Wineburg and Sarah McGrew, "Lateral Reading: Reading Less and Learning More When Evaluating Digital Information," *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2017, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3048994>.

³¹ Joel Breakstone et al., "Lateral Reading: College Students Learn to Critically Evaluate Internet Sources in an Online Course," *Harvard Kennedy School Misinformation Review*, ahead of print, February 23, 2021, <https://doi.org/10.37016/mr-2020-56>.

³² Rui Fan et al., "Higher Contagion and Weaker Ties Mean Anger Spreads Faster than Joy in Social Media," version 3, preprint, arXiv, 2016, <https://doi.org/10.48550/ARXIV.1608.03656>.

³³ Adam D. I. Kramer et al., "Experimental Evidence of Massive-Scale Emotional Contagion through Social Networks," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111, no. 24 (2014): 8788–90, <https://doi.org/10.1073/pnas.1320040111>.

³⁴ Christian von der Weth et al., "Helping Users Tackle Algorithmic Threats on Social Media: A Multimedia Research Agenda," version 1, preprint, arXiv, 2020, <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2009.07632>.

terfragmentasi. Kompetensi ini tidak mengharuskan seseorang meninggalkan media sosial. Kompetensi ini juga tidak menuntut seseorang untuk selalu sepakat dengan pandangan orang lain. Sebaliknya, kompetensi ini mengajarkan bagaimana tetap berpikir jernih, adil, dan proporsional ketika berhadapan dengan banjir informasi digital. Dengan demikian, moderasi tidak hanya dipahami sebagai ajaran moral, tetapi juga sebagai keterampilan epistemik yang harus dilatih dan dipraktikkan oleh setiap pengguna media sosial.

Ketiga: Penguatan peran ulama, akademisi, dan institusi keagamaan

Jika level platform berbicara tentang desain algoritma dan level pengguna berbicara tentang perilaku digital masyarakat, maka level ketiga berbicara tentang aktor yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas pengetahuan publik. Aktor yang penulis dimaksud ialah ulama, akademisi, pesantren, lembaga pendidikan, dan berbagai institusi keagamaan lainnya. Saat terjadi problem moderasi di ruang digital, mereka tidak cukup hanya menjadi penyampai ajaran *wasatiyyah*. Akan tetapi, mereka bertanggung jawab juga untuk memulihkan kondisi epistemik yang rusak akibat distorsi algoritmik.

Peran tersebut dalam artikel ini penulis sebut dengan istilah *epistemic guardianship of wasatiyyah*. Istilah ini merupakan representasi dari tanggung keilmuan para ulama, akademisi dan lain-lain. Mereka adalah *ahl al-dzīkr* sumber pengetahuan masyarakat (Al-Nahl [16]: 43)³⁵ sehingga saat masyarakat mengalami kebingungan akibat informasi yang bercampur antara fakta dan manipulasi algoritmik, maka mereka perlu memberikan penjelasan. Selain itu, peran ini juga sebagai bentuk tanggung jawab mereka untuk melakukan segala macam bentuk amar makruf nahi mungkar secara umum, termasuk dalam konteks media sosial (Āli 'Imrān [3]: 104).³⁶ Dalam hal ini, distorsi algoritmik dapat dipandang sebagai bentuk kemungkaran epistemik karena menyebabkan masyarakat memperoleh pengetahuan yang tidak utuh. Jika algoritma bekerja dengan memperkuat nafsu dan emosi-kemarahan, maka mereka perlu mengontrol pengetahuan masyarakat agar lebih objektif dan seimbang.³⁷

Dalam banyak kasus, algoritma lebih sering menyebarkan informasi yang terpotong, dipercepat, dan dilepaskan dari konteks aslinya. Akibatnya, masyarakat menerima serpihan-serpihan informasi tanpa memiliki kesempatan untuk memahaminya secara utuh. Maka di sinilah kondisi *epistemic wasathiyah* menjadi penting untuk dijaga dan diperbaiki oleh aktor-aktor yang penulis maksud di atas. Dalam situasi ini, tugas ulama tidak berhenti pada penyampaian fatwa atau ceramah keagamaan saja. Akan tetapi, ulama juga harus berfungsi sebagai penjaga konteks (*guardian of context*). Contohnya, saat potongan video yang viral muncul dan menimbulkan kegaduhan, tugas ulama bukan hanya mengajak masyarakat untuk tenang. Ulama juga harus membantu masyarakat memahami konteks yang hilang. Mereka perlu menjelaskan latar belakang peristiwa, posisi para pihak yang terlibat, serta keseluruhan informasi yang tidak tampak dalam potongan video tersebut. Dengan cara seperti ini, ulama membantu masyarakat keluar dari jebakan penilaian yang tergesa-gesa. Hal yang sama berlaku bagi akademisi.

Dalam ruang digital, akademisi tidak cukup hanya memproduksi pengetahuan di ruang kelas atau jurnal ilmiah. Akademisi perlu hadir sebagai penerjemah kompleksitas. Banyak persoalan politik, sosial, dan keagamaan sebenarnya memiliki dimensi yang sangat rumit. Akan tetapi, media sosial sering mereduksi persoalan tersebut menjadi narasi hitam-putih yang

³⁵ Muhammad Sayyid Tantawi, *al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim*, 1st ed. (Dār Nahḍat Miṣr li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1997). Vol. VIII, Hal. 157

³⁶ Abdullah Khadr Hamd, *Al-Kifayah Fi al-Tafsir Bi al-Ma'tsur Wa al-Dirayah* (Dar al-Qalam, 2017). Vol. VI, Hal.217

³⁷ Nur al-Din Mukhtar Al-Khadimi, *Ilm al-Maqāṣid al-Shar'iyah* (Maktabah al-'Ubaykān, 2001). Hal. 143

sederhana.³⁸ Dalam situasi seperti ini, akademisi memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kerumitan yang hilang agar masyarakat dapat melihat suatu persoalan secara lebih proporsional.

Pesantren dan lembaga pendidikan juga memiliki peran yang sangat strategis. Selama ini pesantren dikenal sebagai ruang yang membiasakan santri mempelajari perbedaan pendapat, membaca banyak referensi, dan memahami konteks sebelum mengambil kesimpulan. Tradisi seperti ini sesungguhnya sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat digital saat ini. Oleh sebab itu, pesantren tidak cukup hanya mengajarkan moderasi sebagai nilai. Pesantren juga perlu mengajarkan keterampilan membaca informasi digital secara kritis, memahami cara kerja algoritma, serta membedakan antara informasi utuh dan informasi yang telah mengalami distorsi.

Lebih jauh lagi, institusi keagamaan dapat membangun mekanisme sosial untuk melawan percepatan informasi digital. Salah satu masalah terbesar media sosial ialah kecenderungannya mendorong orang bereaksi sebelum memahami. Dalam kondisi seperti ini, institusi keagamaan perlu menghadirkan ruang-ruang deliberatif yang memungkinkan masyarakat berdialog, bertanya, dan memperoleh penjelasan yang lebih mendalam. Ruang seperti ini menjadi penting karena moderasi biasanya lahir dari proses memahami, bukan dari proses bereaksi secara spontan.

Dalam perspektif ini, *wasatiyyah* tidak lagi dipahami semata-mata sebagai posisi tengah di antara dua ekstrem. *Wasatiyyah* juga harus dipahami sebagai proses pemulihan kualitas pengetahuan publik. Ketika algoritma memecah makna sebuah informasi menjadi fragmen-fragmen kecil, institusi keagamaan bertugas menyatukan kembali fragmen tersebut menjadi pemahaman yang utuh. Ketika algoritma mempersempit perspektif seseorang, institusi keagamaan bertugas memperluas cakrawala pemahamannya. Ketika algoritma mempercepat kemarahan, institusi keagamaan bertugas menghadirkan ruang refleksi yang lebih tenang.

Dengan demikian, *epistemic guardianship of wasatiyyah* dapat dipahami sebagai strategi sosial untuk memulihkan kondisi-kondisi epistemik yang diperlukan agar moderasi dapat tumbuh kembali di media sosial. Jika algoritma bekerja dengan mempercepat reaksi, maka mediasi epistemik bekerja dengan memperdalam pemahaman. Jika algoritma bekerja dengan memotong konteks, maka mediasi epistemik bekerja dengan mengembalikan konteks. Jika algoritma bekerja dengan mempersempit perspektif, maka mediasi epistemik bekerja dengan memperluas perspektif. Di sinilah letak kontribusi dari artikel ini. Krisis moderasi digital tidak cukup dijawab melalui literasi digital atau reformasi algoritma semata, tetapi juga melalui peran aktif ulama, akademisi, pesantren, dan institusi keagamaan sebagai mediator epistemik yang menjaga keberlangsungan *wasatiyyah* di era algoritma.

SIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa problem polarisasi politik di media sosial harus dipahami sebagai problem arsitektur digital. Akar masalahnya bukan persoalan perbedaan ideologi dan politik. Akan tetapi, polarisasi politik di media sosial tidak hanya diakibatkan oleh aktor manusia saja, tetapi juga diproduksi oleh algoritma dengan mekanisme emotional amplification, downranking epistemik, fragmentasi makna, dan echo chamber reproduction. Polarisasi yang dihasilkan oleh algoritma kemudian berdampak langsung terhadap rusaknya nilai-nilai moderasi di ruang digital. Polarisasi politik di media sosial tidak bekerja dengan mengubah keyakinan masyarakat secara normatif, melainkan dengan merusak kondisi epistemik yang memungkinkan moderasi tumbuh dan berfungsi dalam ruang publik. Untuk melakukan

³⁸ Xin Wang et al., "Public Discourse and Social Network Echo Chambers Driven by Socio-Cognitive Biases," version 2, preprint, arXiv, 2020, <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2002.03915>.

pemulihan, penulis menawarkan tiga pilar penguatan moderasi di ruang digital, yaitu perbaikan ulang desain algoritma media sosial, penguatan kompetensi digital wasatiyyah pada pengguna, serta penguatan peran ulama, akademisi, pesantren, dan institusi keagamaan sebagai penjaga kualitas pengetahuan publik. Tiga pilar yang dimaksud harus berkerja secara bersamaan.

REFERENSI

- Al-Jawziyyah, I. al-Q. (1995). *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Shar'iyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Khadimi, N. al-D. M. (2001). *'Ilm al-Maqasid al-Shar'iyah*. Maktabah al-'Ubaykan.
- Al-Tabari, M. ibn J. (2001). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an* (Vol. 21, p. 349). Dar Hajr li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi' wa al-I'lan.
- Al-Zayn, M. F. F. (2004). *Bayan al-Nazm fi al-Qur'an al-Karim* (Vol. 4). Dar al-Fikr.
- Brady, W. J., McLoughlin, K., Doan, T. N., & Crockett, M. (2021). How social learning amplifies moral outrage expression in online social networks. *Science Advances*, 7(33), Article eabe5641. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abe5641>
- Breakstone, J., Smith, M., Connors, P., Ortega, T., Kerr, D., & Wineburg, S. (2021). Lateral reading: College students learn to critically evaluate internet sources in an online course. *Harvard Kennedy School Misinformation Review*. <https://doi.org/10.37016/mr-2020-56>
- Choi, H., Ko, J., & Kim, S. (2022). *How does fake news use a thumbnail? CLIP-based multimodal detection on the unrepresentative news image* (Version 2). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.05533>
- Ecker, U. K. H., Lewandowsky, S., Chang, E. P., & Pillai, R. (2014). The effects of subtle misinformation in news headlines. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 20(4), 323–335. <https://doi.org/10.1037/xap0000028>
- Ekasaputra, D. (2014). *Ijtihad politik K.H.R. Ach. Fawaid As'ad*. Ibrahimy Press.
- Fan, R., Zhao, J., Chen, Y., & Xu, K. (2016). *Higher contagion and weaker ties mean anger spreads faster than joy in social media* (Version 3). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1608.03656>
- Gabrielkov, M., Ramachandran, A., Chaintreau, A., & Legout, A. (2016). Social clicks: What and who gets read on Twitter? In *Proceedings of the 2016 ACM SIGMETRICS International Conference on Measurement and Modeling of Computer Science* (pp. 179–192). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/2896377.2901462>
- Germano, F., Gomez, V., & Sobbrío, F. (n.d.). *Ranking for engagement: How social media algorithms fuel misinformation and polarization*.
- Hamd, A. K. (2017). *Al-Kifayah fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur wa al-Dirayah* (Vol. 6). Dar al-Qalam.
- Huszar, F., Ktena, S. I., O'Brien, C., Belli, L., Schlaikjer, A., & Hardt, M. (2022). Algorithmic amplification of politics on Twitter. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(1), Article e2025334119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2025334119>
- Iyengar, S., Lelkes, Y., Levendusky, M., Malhotra, N., & Westwood, S. J. (2019). The origins and consequences of affective polarization in the United States. *Annual Review of Political Science*, 22(1), 129–146. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051117-073034>
- Khalyubi, W., & Perdana, A. (2021). Electoral manipulation informationally on hoax production in 2019 presidential and vice presidential election in Indonesia. *Journal of Government and Political Issues*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i1.17>
- Kramer, A. D. I., Guillory, J. E., & Hancock, J. T. (2014). Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(24), 8788–8790. <https://doi.org/10.1073/pnas.1320040111>

- Lamb, K. (2024, February 12). K-pop, TikTok and cats: The fight to win the key youth vote in Indonesia's election. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2024/feb/12/indonesia-election-2024-k-pop-tiktok-and-cats-the-fight-to-win-the-key-youth-vote>
- Li, J., & Chang, X. (2023). Combating misinformation by sharing the truth: A study on the spread of fact-checks on social media. *Information Systems Frontiers*, 25(4), 1479–1493. <https://doi.org/10.1007/s10796-022-10296-z>
- Lim, G., & Perrault, S. T. (2024, March 19). *Effects of automated misinformation warning labels on the intents to like, comment and share posts*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2403.12916>
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Martel, C., & Rand, D. G. (2024). Fact-checker warning labels are effective even for those who distrust fact-checkers. *Nature Human Behaviour*, 8(10), 1957–1967. <https://doi.org/10.1038/s41562-024-01973-x>
- McCoy, J., & Somer, M. (2019). Toward a theory of pernicious polarization and how it harms democracies: Comparative evidence and possible remedies. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 681(1), 234–271. <https://doi.org/10.1177/0002716218818782>
- Meixler, E. (2017, December 22). Facebook is dropping its fake news red flag warning after finding it had the opposite effect. *TIME*. <https://time.com/5077002/facebook-fake-news-articles/>
- Metzler, H., & Garcia, D. (2024). Social drivers and algorithmic mechanisms on digital media. *Perspectives on Psychological Science*, 19(5), 735–748. <https://doi.org/10.1177/17456916231185057>
- Milli, S., Carroll, M., Wang, Y., Pandey, S., Zhao, S., & Dragan, A. (2023). *Engagement, user satisfaction, and the amplification of divisive content on social media* (Version 6) [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.16941>
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist mobilisation in Indonesia: Religious intolerance, militant groups and the politics of accommodation. *Asian Studies Review*, 42(3), 479–497. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>
- Putri, Z. (2019, May 21). KPU tetapkan Jokowi-Ma'ruf pemenang Pilpres 2019. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-4558950/kpu-tetapkan-jokowi-maruf-pemenang-pilpres-2019>
- Shalihin, N., & Yusuf, M. (2022). Islamic populism in the public sphere and interest in 212 action. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 4(2), 131–139. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v4i2.309>
- Syahputra, I. (2020). Social media activities and the 212 Movement: The Indonesian Ulema Council's perspective. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 58(2), 323–354. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.323-354>
- Tantawi, M. S. (1997). *Al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim* (Vol. 8). Dar Nahdat Misr li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi'.
- Tsarina, M. K. (2019, May 23). Anies: 8 orang meninggal dunia dalam aksi 21–22 Mei. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-4562836/anies-8-orang-meninggal-dunia-dalam-aksi-21-22-mei>
- Virgy, M. A., et al. (2020). Social media shutdown: A political and cyber securitization of Indonesia's 2019 presidential election. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 12(2).

- von der Weth, C., et al. (2020). *Helping users tackle algorithmic threats on social media: A multimedia research agenda* (Version 1) [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2009.07632>
- Wang, X., et al. (2020). *Public discourse and social network echo chambers driven by socio-cognitive biases* (Version 2) [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2002.03915>
- WennersHerron, A. (2024, November 19). Social media users probably won't read beyond this headline, researchers say. *Penn State University News*. <https://www.psu.edu/news/research/story/social-media-users-probably-wont-read-beyond-headline-researchers-say>
- Wen, B., et al. (2022). *Towards generating robust, fair, and emotion-aware explanations for recommender systems* (Version 1) [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2208.08017>
- Wineburg, S., & McGrew, S. (2017). *Lateral reading: Reading less and learning more when evaluating digital information*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3048994>